

PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Yusri Alawiyah Oktavianti

yusri.oktavianti25@gmail.com

Farida Idayati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to analyze and examine the effect of financial performance on capital expenditure of East Java province based on efficiency, effectiveness, growth of Local-owned Source Revenue and Fiscal Decentralization ratio. In other words, it aimed to find out the measurement of the above variables which affected financial performance of cities/districts at East Java province. The population was 38 districts/cities in East Java province. Moreover, the data collection technique used purposive sampling. Furthermore, the data were secondary, in form of Budget Realization Report which taken from Financial and Asset Management Board of East Java province during 2016-2018. In line with, there were 32 districts/cities as sample. Additionally, the data analysis technique used multiple linear regression with significance level of 0,05 and was arranged using SPSS. Based on hypothesis test, it concluded had positive and significant effect on capital expenditure. Likewise, the growth of Local-owned Source Revenue had positive but insignificant effect on capital expenditure. Beside, fiscal decentralization had positive and significant effect on capital expenditure.

Keywords: growth of local-owned source revenue, fiscal decentralization, financial performance, capital expenditure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap belanja modal pada Provinsi Jawa Timur berdasarkan rasio Efisiensi, Efektivitas, Pertumbuhan Pendapatan Asli daerah dan Desentralisasi Fiskal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengukuran variable-variable diatas mempengaruhi kinerja keuangan Kabupaen/Kota di Provinsi Jawa Timur. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. Periode pengamatan sampel yaitu tahun 2016-2018 dengan menggunakan data sekunder yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur. sehingga diperoleh 32 Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria sample pada penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi 0,05 dan diolah menggunakan software SPSS. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dihasilkan bahwa Ukuran Efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pengaruh Efektivitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Kata Kunci: pertumbuhan PAD, desentralisasi fiskal, kinerja keuangan, belanja modal

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik dalam era globalisasi saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ditandai dengan kecepatan arus informasi, globalisasi, dan ekonomi digital tidak akan pernah dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Berbagai macam inovasi-inovasi yang dihadirkan oleh pemerintah salah satunya peran tekonologi dan komunikasi yang perkembangannya dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Selain itu meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) dapat memberikan peluang yang besar bagi daerah itu sendiri untuk lebih mengoptimalkan potensi atau kekayaan daerah yang dimiliki.

Kemampuan Pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang baik sangat berdampak besar bagi kemajuan dan nasib di daerah tersebut. Semakin banyak potensi-potensi ekonomi yang digali oleh pemerintah daerah maka semakin besar pula sumber keuangan yang didapat sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang semakin besar peluang untuk meningkatkan belanja modal daerah. Perlunya alokasi belanja modal yang lebih tinggi, dengan harapan pemerintah dapat daerah mampu menyediakan pelayanan publik yang terbaik bagi penggunanya yaitu masyarakat. Belanja modal pada pemerintahan daerah memegang peran sebagai daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian yang terdapat pada daerah tersebut maka dari itu, belanja modal itu sendiri mempunyai pengaruh penting dalam daerah dan manfaatnya dapat dirasakan selama satu tahun kedepan.

Kinerja keuangan daerah dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan kinerja pemerintah yang telah dilakukannya. Dengan melihat kinerja keuangan dapat mengetahui akuntabilitas dari pemangku kekuasaan, dimana setiap rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan roda pemerintahan (Mahmudi, 2006). Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak. Misalnya pembangunan jembatan Suramadu, memperlancar distribusi barang dan jasa antar daerah di Jawa Timur dan Madura khususnya, pembangunan bandara di Sumenep dan Bawean menjadi fasilitas yang menunjang pariwisata di daerah tersebut, sehingga pendapatan daerah akan meningkat dan kinerja keuangan pemerintahan juga ikut meningkat.

Pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat diukur melalui terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang bersifat efektif serta efisien pada suatu daerah tersebut. Tingkat efektivitas keuangan daerah dapat dinilai dari rasio realisasi PAD terhadap target pendapatan yang telah dirancang sebelumnya berdasarkan potensi riil daerah. Selain rasio efektivitas, menilai rasio efisiensi juga dibutuhkan karena setiap pendapatan yang diperoleh pemerintah harus dialokasikan serta dimanfaatkan dengan baik dan tepat guna. Provinsi Jawa Timur memiliki potensi pendapatan dari berbagai sektor, salah satunya potensi pariwisata yang baik serta tersebar di setiap daerahnya. Terdapat banyak juga kota-kota atau kabupaten di Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan sebagai kota yang baik, hal ini merupakan salah satu bentuk investasi daerah karena dapat meningkatkan pariwisata daerah salah satunya Kota Banyuwangi dan Kota Malang. Namun pada kenyataannya jika dilihat dari laporan keuangan tahun 2017 dari 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur tidak satu pun tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap sumber dana dari pihak eksternal yang melebihi 50%. Dengan presentase tertinggi pada Kabupaten Gresik 36,3% bahkan pada Kabupaten Pasuruan presentase kemandirian keuangan daerah senilai 8,06% yang mana nilai ini sangatlah rendah. Hal ini mengandung arti bahwa pemerintah kota/kabupaten di Jawa Timur masih mengandalkan bantuan dana dari pemerintah pusat. Padahal masih banyak potensi-potensi daerah yang masih bisa digali dan dapat menghasilkan pendapatan daerah lebih besar dari pada harus bergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang digunakan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Sularso dan Restianto (2011) hasil yang ditunjukkan bahwa pengalokasian belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten/Kota di Jawa Tengah dipengaruhi

oleh kinerja keuangan, khususnya rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, PAD, dan derajat desentralisasi kontribusi BUMD, namun pada rasio derajat desentralisasi tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Assyurriani (2016) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pada tahun 2014, besar rasio desentralisasi rata-rata untuk 10 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara rerata 3,959% sementara pada tahun 2016 meningkat menjadi 5,441%.

Penelitian selanjutnya membahas tentang rasio efektivitas yang mana diukur dengan cara membandingkan jumlah realisasi PAD yang dihitung berdasarkan alokasi PAD pada tahun yang bersangkutan, maka suatu daerah dapat dikatakan efektif apabila jumlah realisasi pendapatan melebihi atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Seftianne dan Handayani (2011) mengemukakan bahwa rasio efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur?, (2) Apakah efektivitas keuangan daerah berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur?, (3) Apakah Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur?, (4) Apakah Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur?.

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui dan menguji pengaruh efisiensi keuangan daerah terhadap belanja modal Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, (2) Untuk mengetahui dan menguji pengaruh efektivitas keuangan daerah terhadap belanja modal Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, (3) Untuk mengetahui dan menguji pengaruh pertumbuhan asli daerah terhadap belanja modal Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, (4) Untuk mengetahui dan menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan dalam sektor publik yaitu hubungan antara masyarakat dan pemerintah atau dapat juga hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mendapatkan tugas dan wewenang dari pemerintah pusat yang harus dipertanggungjawabkan kembali ke pemerintah pusat. Namun, tidak terlewat pemerintah daerah juga harus memaksimalkan kesejahteraan daerah mereka sendiri. Hubungan keagenan pada sektor publik khususnya pada pemerintahan dapat dilihat dalam kinerja keuangan salah satunya proses penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran daerah harus melalui persetujuan dari pemerintah pusat sebagai prinsipal. Dimana kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah daerah berdasarkan anggaran yang diberikan dari pemerintah pusat. Selanjutnya setelah dijalanannya kegiatan tersebut pemerintah daerah juga harus mempertanggungjawabkan realisasi anggaran terhadap pemerintah pusat. Selain hubungan pemerintah pusat dan daerah juga ada hubungan antara legislatif dan eksekutif, eksekutif adalah agen sedangkan legislatif adalah prinsipal (Halim, 2007). Legislator adalah pihak yang sudah terpilih untuk mewakili suara rakyat seperti pemerintah atau panitia di legislatif untuk membuat kebijakan baru berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.

Belanja Modal

Belanja modal adalah arus pengeluaran yang terjadi dalam memperoleh aset tetap, dimana manfaat yang dapat digunakan atau dinikmati dalam kurun waktu lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal sangat perlu dilakukan dalam sebuah perusahaan/instansi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Belanja modal dalam kata lain diistilahkan sebagai pembelanjaan perusahaan/instansi terkait sebagai sarana pengalokasian dana untuk diinvestasikan dalam berbagai aset perusahaan/instansi (Riyanto, 2001). Maka, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal karena belanja modal menjadi faktor penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Cara mendapatkan belanja modal dengan melalui proses lelang atau tender. Alokasi belanja modal ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Halim (2008:232) ada enam rasio yang dapat dijadikan tolok ukur dalam kinerja keuangan pemerintah yaitu: (1) Rasio Kemandirian (Otonomi Fiskal), (2) Rasio Efektivitas, (3) Rasio Efisiensi, (4) Rasio Aktifitas, (5) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), dan (6) Rasio Pertumbuhan. Pengukuran kinerja juga memiliki tujuan tertentu dalam setiap organisasi. Tujuan diadakannya pengukuran kinerja dalam umumnya adalah dapat meningkatkan atau memotivasi seluruh pegawai dari mulai direktur, manajerial atau karyawan secara personal dalam memenuhi standar yang berlaku di perusahaan mereka bekerja dan telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal sesuai dengan yang diinginkan organisasi.

Rasio Efisiensi

Pengertian efisiensi yang dikatakan oleh Mardiasmo (2009) adalah berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Dengan kata lain efisiensi diartikan sebagai berdaya guna dalam penggunaan sumber daya yang ada dan berhubungan dengan konsep produktivitas dalam bekerja. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 266/PMK.07/2016 mengenai Peningkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah rasio efisiensi dapat dikatakan searah apabila pemerintah daerah mampu mengelola keuangan daerah dan merealisasikan pendapatan serta penerimaan pembiayaan dalam mendanai belanja daerah dan pengeluaran pembiayaannya. Begitu sebaliknya, dikatakan tidak searah apabila pemerintah tidak mampu mengelola keuangan daerah dan merealisasikan pendapatannya serta penerimaan pembiayaan dalam mendanai belanja daerah dan pengeluaran pembiayaannya.

Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009:132) pada dasarnya efektivitas merupakan keterkaitan antara pencapaian tujuan dan target kebijakan (hasil guna). Elemen efektivitas digambarkan dengan jangkauan dari dampak dan akibat (*outcome*) dan pengeluaran (*output*) dalam suatu program kegiatan dalam mencapai tujuan atau sasaran program. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 266/PMK.07/2016 tentang Peningkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah rasio efektivitas dapat dikatakan searah apabila pemerintah daerah mampu mengelola keuangan daerah dengan proporsi yang baik apabila nilai realisasi yang dihasilkan lebih besar daripada target yang dianggarkan.

Rasio Pertumbuhan PAD

Pertumbuhan PAD digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan diukur dengan cara perhitungan nilai PAD pada periode sekarang dikurangi dengan nilai PAD tahun lalu dan dibagi dengan PAD tahun sebelumnya.

Desentralisasi Fiskal

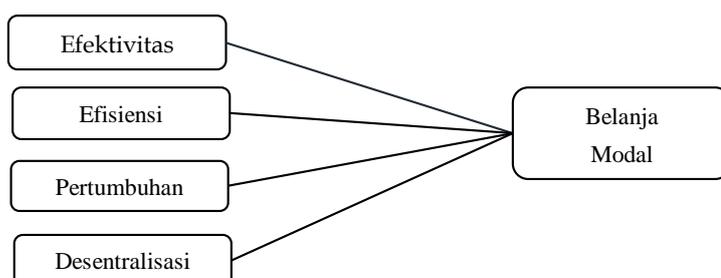
Desentralisasi fiskal diartikan sebagai alat ukur untuk mencapai salah satu tujuan negara seperti memberikan pelayanan publik yang baik dan sebagai alat pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Pengertian lain yaitu desentralisasi fiskal adalah sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang tinggi ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melaksanakan pembangunan di daerah.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran atau yang biasa disebut LRA merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan entitas sektor publik yang menunjukkan ketaatan terhadap ketentuan perundang undangan yang berlaku. LRA dapat juga dikatakan sebagai penyajian laporan keuangan yang berisi alokasi, ikhtisar sumber, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta gambaran dari perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam suatu periode pelaporan yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja. Laporan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara yang dimaksud dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Menurut Standart Akuntansi Pemerintahan yang tercantum pada PP No.71 tahun 2010 Laporan Realisasi Anggaran dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas perubahan dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi berupa alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun dan fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat dibandingkan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Tingkat Efisiensi Anggaran terhadap Belanja Modal.

Rasio efisiensi menggambarkan mengenai perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan seberapa besar realisasi pendapatan yang diterima. Rasio efisiensi dapat dikatakan searah apabila pemerintah daerah mampu mengelola keuangan daerah dan merealisasikan pendapatan serta penerimaan pembiayaan dalam mendanai belanja daerah dan pengeluaran pembiayaannya, dan sebaliknya. Pada penelitian yang dilakukan Tamawiwiy *et al.*, (2016) hasil hipotesis pengaruh rasio efisiensi terhadap belanja modal menunjukkan pengaruh positif Hal ini diakibatkan karena adanya tumpang tindih pendanaan dan tidak sesuai dengan implementasi anggaran keuangan pemerintah daerah.

H₁: Pengaruh efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal

Pengaruh Tingkat Efektivitas Anggaran terhadap Belanja Modal.

Rasio efektivitas menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah dalam merealisasikan PAD yang telah di rencanakan dengan target yang di tetapkan berdasarkan potensi riil daerah selama satu periode. Anggaran yang sudah di anggarkan dalam periode tertentu seharusnya dialokasikan dengan tepat pula hanya untuk kebutuhan-kebutuhan daerah yang tepat sehingga pemerintah dapat melakukan belanja modal yang sesuai dengan yang sudah dianggarkan. Semakin besar nilai realisasi penerimaan PAD yang didapat oleh pemerintah daerah dibanding target penerimaan PAD maka dikatakan semakin efektif. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dan Subekan (2014) dan Kusumawati (2010) menunjukkan hasil yang sama oleh penelitian ini dinyatakan bahwa, rasio efisiensi keuangan daerah tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap belanja modal tahun berikutnya.

H₂: Pengaruh Efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal

Pengaruh Pertumbuhan PAD terhadap Belanja Modal

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana Pendapatan Asli Daerah didapatkan dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan, pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan yang sah pengertian ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014. Darwanto dan Yustikasari (2007) juga mengemukakan bahwa peningkatan PAD akan memberikan dampak meningkatnya pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan alokasi belanja modal. Tuasikal (2008) menemukan bahwa PAD positif terhadap Belanja Modal dan hasil yang sama dikemukakan oleh penemuan sebelumnya, Jaya dan Dwirandra (2014) bahwa semakin besar PAD maka penerimaan tersebut digunakan dalam penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik sehingga besar juga Belanja Modalnya. Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini dapat mengajukan hipotesis diantaranya

H₃: Pertumbuhan PAD berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal.

Dana perimbangan diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, hal ini dapat dijadikan sebagai insentif dalam keuangan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah itu sendiri. Tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditandai dengan adanya desentralisasi fiskal. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nguyen dan Anwar (2011) yang meneliti tentang "*Fiscal Decentralization and Economic Growth in Vietnam*" menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dari sisi pendapatan, tetapi negatif dari sisi pengeluaran. Berdasarkan opini di atas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₄: Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang ciri-cirinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur sejak awal pembuatan penelitian. Menurut Kasiram (2008) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang memproses data-data biasanya berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian atau penelitian, terutama hal apa yang sudah diteliti.

Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau objek yang memiliki karakter & kualitas tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2008). Populasi pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur berjumlah KABUPATEN/kota yang terdiri atas 29 pemerintahan kabupaten dan 9 pemerintahan kota. yang mengeluarkan laporan keuangan secara berturut-turut selama empat tahun terakhir dari tahun 2016-2018.

Teknik Pengambilan Sampel

Metode yang digunakan adalah metode purposive Sampling. *Purposive Sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan seperlunya. Maka, setiap individu/unit yang dipilih dalam populasi penelitian ini akan dipilih atau disaring dari populasi sesuai kebutuhan dan pertimbangan tertentu (Purwanto dan Sulistyastuti, 2017:47). Pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang sudah menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Jawa Timur, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut pada tahun 2016-2018, (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur yang menyajikan data yang dibutuhkan yaitu data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah selama 4 tiga tahun berturut-turut pada tahun 2016-2018, serta mengandung data yang dibutuhkan untuk perhitungan rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan PAD, rasio desentralisasi.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data dokumenter dengan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder yaitu data laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit dan diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur, periode yang digunakan selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2016-2018.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Belanja Modal

Belanja modal sangat perlu dilakukan dalam sebuah perusahaan/instansi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Belanja modal dalam kata lain diistilahkan sebagai pembelanjaan perusahaan/instansi terkait sebagai sarana pengalokasian dana untuk diinvestasikan dalam berbagai asset perusahaan/instansi (Riyanto, 2011). Belanja modal biasanya berupa pengeluaran dana yang dilakukan manajemen terhadap rencana, peralatan, properti. Belanja modal kaitannya sangat erat dengan investasi. Alokasi belanja modal ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan asset tetap Pemerintah Daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Variabel Independen

Efisiensi (Efs)

Efisiensi adalah rasio pendapatan dibandingkan pengeluaran pemerintah kabupaten/kota yang menggambarkan seberapa tepat kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan. Efisiensi adalah suatu keadaan dimana saat penyelesaian suatu pekerjaan yang dilaksanakan dengan penuh skill yang dimiliki. Rasio yang digunakan dalam pengukuran efisiensi adalah realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Berikut formula yang digunakan untuk menghitung Efisiensi:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Efektivitas (Efk)

Menurut Mardiasmo (2009:132) pada dasarnya efektivitas merupakan keterkaitan antara pencapaian tujuan dan target kebijakan (hasil guna). Elemen efektivitas digambarkan dengan jangkauan dari dampak dan akibat (*outcome*) dan pengeluaran (*output*) dalam suatu program kegiatan dalam mencapai tujuan atau sasaran program. Agar mendapatkan hasil yang efektif dalam proses kerja suatu entitas publik maka, kontribusi pengeluaran (*output*) harus semakin ditingkatkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran telah ditentukan.

Berikut formula yang digunakan untuk menghitung Efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan PAD (PAD)

Pertumbuhan PAD digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan diukur dengan cara perhitungan nilai PAD pada periode sekarang dikurangi dengan nilai PAD tahun lalu dan dibagi dengan PAD tahun sebelumnya. Berikut formula yang digunakan untuk menghitung Pertumbuhan PAD:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD}_t - (\text{PAD}_{t-1})}{(\text{PAD}_{t-1})} \times 100\%$$

Rasio Desentralisasi Fiskal (Fk)

Desentralisasi fiskal diartikan sebagai alat ukur untuk mencapai salah satu tujuan negara seperti memberikan pelayanan publik yang baik dan sebagai alat pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Pengertian lain yaitu desentralisasi fiskal adalah sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang tinggi ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Berikut formula yang digunakan untuk menghitung Desentralisasi Fiskal:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2013) statistik deskriptif memberikan suatu gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum dari masing-masing variabel penelitian sehingga secara kontekstual dapat lebih

mudah dipahami dan dapat menyajikan karakteristik tertentu dari suatu sampel. Dengan demikian, gambaran secara ringkas mengenai data penelitian dapat diketahui.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan dependen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini dilakukan dengan menggunakan grafik normal *probability plot* dimana dilakukan perbandingan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dalam uji normalitas ini dilakukan pula *One-Sample Kolmogorov Smirnov* dengan tingkat signifikansi 0,05. Berikut ini dasar pengambilan keputusan: (a) Data berdistribusi normal, bila *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05, (b) Data tidak berdistribusi normal, bila *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,05.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2013:105) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Batas dari nilai *tolerance* adalah $\geq 0,10$ atau nilai VIF adalah ≤ 10 (Ghozali, 2013:106).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Pendekatan yang sering digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi adalah uji *Durbin-Watson (DW Test)* (Ghozali, 2013:110). Menurut Ghozali (2013:110), pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut: (a) Nilai *DW* di bawah -2 berarti diindikasikan ada autokorelasi positif, (b) Nilai *DW* di antara -2 sampai 2 berarti diindikasikan tidak ada autokorelasi, (c) Nilai *DW* di atas 2 berarti diindikasikan ada autokorelasi negatif.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013:139). Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas. Berikut ini dasar pengambilan keputusan yaitu: (a) Terjadi heteroskedastisitas, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), (b) Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0 (nol) pada sumbu Y .

Analisis Regresi Berganda

Tujuan analisis regresi berganda yaitu menganalisis bentuk hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Berikut persamaan regresi berganda dalam penelitian ini:

$$BM = a + \beta_1 \text{EFS} + \beta_2 \text{EFK} + \beta_3 \text{PAD} + \beta_4 \text{DSFK} + \varepsilon$$

Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2013) koefisien determinasi (atau disimbolkan dengan R^2) bertujuan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1. Semakin besar R^2 (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dalam menjelaskan variabel dependen dan semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

Uji Goodness Of Fit (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji apakah model yang bagian dalam persamaan regresi sesuai atau *fit*. Jika probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 0,05 maka variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Jika probabilitas lebih kecil 0,05 maka variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat.

Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Ghozali (2013:98) uji t pada dasarnya menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria: (a) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. (b) Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil dari pengumpulan data sekunder mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2016-2018, maka hasil dari SPSS tentang statistik deskriptif yang meliputi nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum variabel penelitian disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	92	24.98	30.82	26.7246	0.78886
EFS	92	64.07	114.70	94.5757	9.60621
EFK	92	46.20	162.60	100.5706	16.74177
PAD	92	-89.92	655.29	36.2662	117.37208
DSFSK	92	41.48	713.16	192.2503	155.84198

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diolah, 2020

Dari hasil statistik deskriptif dapat dilihat dari pengolahan data yang menghasilkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa di dalam penelitian ini terdapat 165 data observasi yang digunakan, dengan rincian variabel dependen dan variabel independen sebagai berikut:

Efisiensi

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa variabel efisiensi memiliki nilai minimum 64,07 dan nilai maximum 114,70. Hasil ini menunjukkan bahwa kisaran nilai efisiensi paling rendah 64,07 dan pada tingkat tertinggi pada nilai 114,70. Nilai rata-rata (*mean*) juga ditunjukkan pada angka 94,5757 dan memiliki standart deviasi 9,60621. Berarti rata-rata nilai efisiensi pada kabupaten/kota di Jawa Timur adalah 94,5757. Nilai minimum pada variabel efisiensi sebesar 64,07 dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan pada tahun 2016. Sedangkan nilai maksimum pada variabel efisiensi sebesar 114,70 Kota Kediri pada tahun 2016.

Efektivitas

Variabel efektivitas memiliki nilai minimum atau paling rendah 46,20 sedangkan nilai maximum yang dihasilkan sebesar 162,60. Artinya, nilai efisiensi untuk beberapa kota/kabupaten di Jawa Timur paling rendah sebesar 46,20 dan nilai tertinggi pada angka

162,60. Nilai rata-rata (*mean*) pada variabel efektivitas sebesar 100,5706 serta standart deviasi pada nilai 16,74177. Nilai minimum sebesar 46,20 dimiliki Kabupaten Ngawi di tahun 2018. Sedangkan memiliki nilai maksimum sebesar 162,60 dimiliki Kabupaten Kediri di tahun 2018.

Pertumbuhan PAD

Variabel Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum atau paling rendah -89,92 sedangkan nilai maximum yang dihasilkan sebesar 655,29. Artinya, nilai Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah untuk beberapa Kota/Kabupaten di Jawa Timur paling rendah sebesar -89,92 dan nilai tertinggi pada angka 655,29. Nilai rata-rata (*mean*) pada variabel Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 36,2662 serta standart deviasi pada nilai 117,37208. Nilai minimum sebesar -89.92 dimiliki Kota Madiun di tahun 2016. Sedangkan memiliki nilai maksimum sebesar 655,29 dimiliki Kabupaten Sidoarjo di tahun 2017.

Desentralisasi Fiskal

Variabel Desentralisasi Fiskal memiliki nilai minimum atau paling rendah 41,48 sedangkan nilai maximum yang dihasilkan sebesar 713,16. Artinya, nilai Desentralisasi Fiskal untuk beberapa Kota/Kabupaten di Jawa Timur paling rendah sebesar 41,48 dan nilai tertinggi pada angka 713,16. Nilai rata-rata (*mean*) pada variabel Desentralisasi Fiskal sebesar 192,2503 serta standart deviasi pada nilai 115,84198. Nilai minimum sebesar 41,48 dimiliki Kota Kediri di tahun 2016. Sedangkan memiliki nilai maksimum sebesar 713,16 dimiliki Kabupaten Pacitan di tahun 2017.

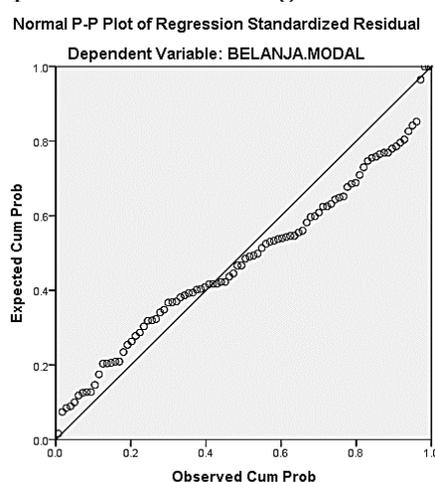
Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel independen dan dependen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Berdasarkan data yang telah di uji menggunakan SPSS, maka hasil pengujian normalitas dengan analisis grafik *normal probability plot* dan normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* disajikan sebagai berikut:

Uji Normalitas dengan Analisis Grafik

Berdasarkan Gambar 2 di bawah ini dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik normal probability plot tidak menyebar di daerah garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Grafik *normal probability plot* yang dapat menggambarkan distribusi data dapat disajikan pada Gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2
 Hasil Uji Normalitas Data dengan Analisis Grafik
 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diolah, 2020

Uji Normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov*

Pada Tabel 2 berikut ini menyajikan hasil uji normalitas data dengan *Kolmogorov-Smirnov*:

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas Data dengan *Kolmogorov-Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.00E+00
	Std. Deviation	0.73963765
Most Extreme Differences	Absolute	0,125
	Positive	0,125
	Negative	-0,078
Kolmogorov-Smirnov Z		1.201
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.112

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diolah, 2020

Dari Tabel 2 di atas menunjukkan hasil uji normalitas data *Kolmogorov-Smirnov*, dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah $0,112 > 0,05$, yang berarti nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* tersebut termasuk kriteria distribusi normal suatu data yaitu jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* bernilai $> 0,05$.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Hasil dari uji multikolinearitas dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
EFS	.956	1.046
EFK	.972	1.029
PAD	.972	1.029
DSFSK	.994	1.006

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diolah, 2020

Pada Tabel 3 di atas terlihat bahwa dari seluruh variabel independen yaitu Efisiensi, Efektivitas, Pertumbuhan PAD, dan Desentralisasi Fiskal memiliki nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Dari nilai tersebut menandakan bahwa dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas.

Demikian juga dengan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* pada Tabel 3 di atas. Diketahui bahwa variabel Efisiensi memiliki nilai sebesar 1,046; variabel Efektivitas memiliki nilai sebesar 1,029, variabel Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1.029, dan variabel Desentralisasi Fiskal sebesar 1,006.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi untuk menguji apakah model regresi linear ada kolelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian ini digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Hasil uji autokorelasi dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

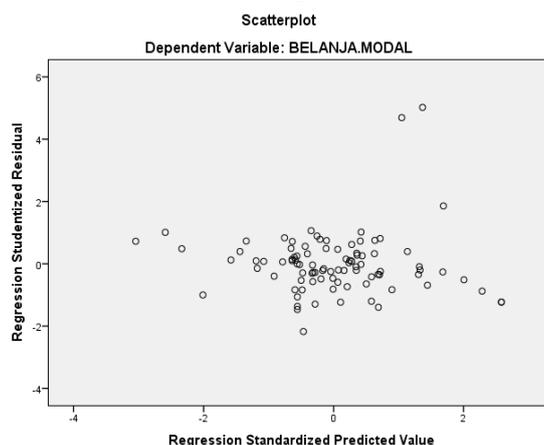
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.348 ^a	.121	.080	.75645	1.687

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diolah, 2020

Pada Tabel 4 di atas terlihat bahwa nilai *Durbin-Watson (DW)* sebesar 1,687. Nilai *Durbin-Watson (DW)* tersebut terletak di antara -2 sampai 2 yang berarti diindikasikan tidak ada autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013:139). Heterokedastitas dapat dideteksi dengan berbagai cara, salah satu cara untuk mengetahuinya digunakan grafik plot (*scatter plot*) antara nilai prediksi variabel tergantung (ZPRED) dengan residual (ZRESID). Deteksi dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada scatter plot antara ZPRED dan ZRESID yang mana, sumbu y adalah variabel tergantung dan telah distandarisasi. Grafik *Scatterplot* disajikan pada Gambar 3 sebagai berikut:



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik Scatterplot
 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diolah, 2020

Dari Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola yang teratur dan jelas, serta titik-titik tersebar berada di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0 (nol) yang terdapat pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian bebas dari masalah heteroskedastisitas atau terjadi homokedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk menganalisis bentuk hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Berikut ini merupakan data yang diolah menggunakan SPSS diperoleh hasil analisis regresi berganda sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	24.176	.888		27.214	.000
EFS	.017	.008	.209	2.030	.045
1 EFK	.007	.005	.145	1.423	.158
PAD	.0003	.001	.049	.482	.631
DSFSK	.001	.001	.235	2.328	.022

a. Dependent Variabel: BELANJA.MODAL

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diolah, 2020

Dari Tabel 5 menunjukkan hasil dari analisis regresi berganda, maka dapat disusun persamaan faktor-faktor yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Belanja Modal sebagai berikut:

$$BM = 24,176 + 0,017 \text{ EFS} + 0,007 \text{ EFK} + 0,0003 \text{ PAD} + 0,001 \text{ DSFK} + \varepsilon$$

Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6
Hasil Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.348	.121	.080	.75645

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diolah, 2020

Dari Tabel 6 di atas diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0,121 atau 12,1%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa keragaman variabel belanja modal 12,1% dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu variabel Efisiensi, Efektivitas, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Desentralisasi Fiskal. Sedangkan sisanya sebesar 87,9% ($100\% - 12,1\% = 87,9\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Uji Goodness Of Fit (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji apakah model yang bagian dalam persamaan regresi sesuai atau *fit*. Uji F ini dapat dijelaskan pada *Analysis of Variance* (ANOVA) dengan tingkat signifikansi (probabilitas) 0,05. Jika probabilitas lebih kecil 0,05 maka variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen), maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dilanjutkan pengujian selanjutnya. Hasil uji *Goodness Of Fit* (Uji F) dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Goodness Of Fit (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	6.846	4	1.712	2.991	0.023
¹ Residual	49.783	87	.572		
Total	56.629	92			

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diolah, 2020

Berdasarkan hasil Uji *Goodness Of Fit* (Uji F) yang disajikan pada Tabel 7 ANOVA di atas, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 2,991 dengan nilai signifikansi (*Sig.*) sebesar 0,023. Karena nilai signifikansi (*Sig.*) < 0,05, maka persamaan regresi layak atau baik untuk dijadikan sebagai alat estimasi dan dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t pada dasarnya menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hasil dari signifikansi uji t yang kurang dari 0,05 maka menunjukkan ada pengaruh x terhadap y atau hipotesis penelitian diterima dan sebaliknya jika hasil signifikansi uji t yang lebih dari 0,05 maka menunjukkan tidak ada pengaruh x terhadap y atau hipotesis penelitian diterima. Berikut ini hasil uji hipotesis (Uji t) disajikan pada Tabel 8:

Tabel 8
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients^a

S	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	24.176	0.888		27.214	0.000
EFS	0.017	0.008	0.209	2.030	0.045
¹ EFK	0.007	0.005	0.145	1.423	0.158
PAD	0.0003	0.001	0.049	0.482	0.631
DSFSK	0.001	0.001	0.235	2.328	0.022

a. Dependent Variabel: BELANJA.MODAL

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diolah, 2020

Pada Tabel 8 di atas, , nilai t-hitung dari masing-masing variabel independen, yaitu variabel Efisiensi sebesar 2,030 dengan nilai sig 0,045; variabel Efektivitas sebesar 1,423 dengan nilai sig 0,158; variabel Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,482 dengan nilai sig 0,631; dan Desentralisasi Fiskal sebesar 2,328 dengan nilai sig 0,022.

Sedangkan nilai signifikansi (*Sig.*) variabel Efisiensi sebesar 0,045; variabel Efektivitas sebesar 0,158; variabel Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,631; dan variabel Desentralisasi Fiskal sebesar 0,022. Maka dapat disimpulkan bahwa dari keempat variabel independen tersebut yang memiliki pengaruh terhadap variabel belanja modal yaitu rasio efisiensi dan desentralisasi fiskal karena nilai karena nilai signifikansi (*Sig.*) < 0,05. Sedangkan, rasio efektivitas dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Pengaruh Tingkat Efisiensi Anggaran terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas menunjukkan bahwa variabel efisiensi anggaran memiliki nilai koefisiensi regresi sebesar 0,017 dengan nilai signifikansi sebesar 0,045 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hasil pengujian ini menjelaskan bahwa variabel efisiensi berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sehingga dalam penelitian ini H_1 diterima. Artinya semakin tinggi tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah, maka semakin meningkat belanja modal. Hal ini berarti bahwa tingkat efisiensi yang tinggi akan mempengaruhi tingkat belanja modal semakin besar.

Terdapat 32 kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang tingkat efisiensi dinilai cukup baik. Pada hasil penelitian ini dapat disimpulkan signifikan, karena pemerintah Provinsi Jawa Timur mampu mengelola keuangan daerah dan merealisasikan pendapatan, pembiayaan dan penerimaan daerah dalam mendanai belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan serta sebaliknya dengan baik dan efisien. Belanja modal daerah yang meningkat pada penelitian ini diakibatkan karena anggaran yang digunakan sudah melalui perencanaan yang matang serta pemerintah telah meminimalisir *output* untuk meminimalisir input yang banyak dengan cara ini akan membuat pemerintah daerah menghemat anggaran dan akan melakukan proses belanja sesuai dengan kerangka anggaran yang sudah ditetapkan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dan Subekan (2014), Ardhini dan Handayani (2011). Namun berbeda dengan pada penelitian yang dilakukan oleh Seftianne dan Handayani (2011) dan Aulianisa (2013) menunjukkan hasil yang sama oleh penelitian ini dinyatakan bahwa, rasio efisiensi keuangan daerah tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap belanja modal tahun berikutnya.

Pengaruh tingkat Efektivitas Anggaran terhadap Belanja Modal

Pada variabel Efektivitas di penelitian ini menunjukkan hasil berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan rasio belanja modal. Sehingga dalam penelitian ini H_2 ditolak. Variabel efektivitas diukur menggunakan realisasi PAD dan tatger PAD berpengaruh positif terhadap rasio belajar modal. Artinya, kinerja keuangan pemerintah daerah dengan parameter tingkat efektivitas yang meningkat tidak mempengaruhi tingkat belanja modal semakin besar. Pada hasil penelitian ini dapat dikatakan kurang efektif, karena pemerintah provinsi Jawa Timur belum mampu merealisasikan PAD yang telah direncanakan dengan Target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang ada pada kurun waktu satu periode berjalan.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tamawiwiy *et al.*, (2016) serta pada penelitian Pradiatmi dan Wibowo (2016). Namun berbeda dengan pada penelitian yang dilakukan oleh Vegasari (2010) menunjukkan hasil yang berbeda oleh penelitian ini dinyatakan bahwa, rasio efektivitas keuangan daerah tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap belanja modal tahun berikutnya.

Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian ini menyatakan H_3 diterima, menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Asli Daerah yang diukur menggunakan total aset berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio belanja modal. Namun, Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai nilai signifikansi sebesar 0,0631 yang berarti lebih besar dari 0,05. Menurut hasil pengukuran data yang telah diolah menyimpulkan bahwa pertumbuhan PAD pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur dinilai belum mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Disebabkan sebagian besar pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di masyarakat dan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Cara kinerja yang seperti ini akan merujuk pada kinerja

yang kurang baik karena pemerintah daerah telah memiliki sifat kemandirian dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tamawiwiy *et al.*, (2016) serta pada penelitian Pradiatmi dan Wibowo (2016). Namun berbeda dengan pada penelitian yang dilakukan oleh Vegasari (2010) menunjukkan hasil yang berbeda oleh penelitian ini dinyatakan bahwa, rasio efisiensi keuangan daerah tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap belanja modal tahun berikutnya.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal

Pada variabel Desentralisasi Fiskal di penelitian ini menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dengan parameter desentralisasi fiskal terhadap rasio belanja modal. Sehingga dalam penelitian ini H_4 diterima. Desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Artinya, apabila rasio desentralisasi fiskal meningkat maka akan semakin tinggi pembiayaan belanja modal untuk publik dalam penyelenggaraan desentralisasi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas menunjukkan bahwa variabel efektivitas memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,001 dengan nilai signifikansi sebesar 0,022 yang berarti lebih kecil dari 0,05.

Terdapat 32 kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang tingkat desentralisasi fiskal dinilai cukup baik, disebabkan nilai efisiensi di atas 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa, pemerintah telah mampu memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap kesadaran masyarakat di Jawa Timur dalam hal pembayaran pajak daerah yang telah ditetapkan daerah serta dalam pengertian lain pemerintah daerah telah memahami kemampuan dalam menggali potensi-potensi pajak daerahnya sendiri. Jika pajak daerah yang dipungut lebih banyak maka pendapatan daerah lebih banyak pula. Sehingga belanja daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah juga akan teralokasi dengan baik. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Yovita dan Utomo (2011), namun penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Verawaty (2016) serta Sulistyowati dan Muid (2011).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal pada KABUPATEN/kota di Provinsi Jawa Timur dalam tahun anggaran 2016-2018. Dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Hasil uji hipotesis menunjukkan variabel efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio belanja modal. Hal ini menandakan semakin tinggi tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur, maka semakin meningkat kinerja keuangan pemerintah daerah pula. Kondisi ini akan semakin mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut, (2) Hasil uji hipotesis menunjukkan variabel efektivitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap rasio belanja modal. Artinya, sebagian besar kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur masih belum mampu merealisasikan PAD yang telah direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang ada pada kurun waktu satu periode berjalan. Maka dalam implementasinya, semakin tinggi tingkat efektivitas keuangan daerah tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat pada daerah tersebut, (3) Hasil uji Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap rasio belanja modal. Artinya, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah untuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak diikuti dengan meningkatnya belanja modal juga. Rasio pertumbuhan PAD ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya, (4) Hasil uji rasio Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif dan

signifikan. Hubungan positif dan signifikan pada rasio Desentralisasi fiskal disebabkan karena, tingkat pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan penerimaan daerah maka dihasilkan nilai positif dan signifikan. Artinya, pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dinilai telah mampu menunjukkan tanggung jawab yang cukup baik untuk melaksanakan pembangunan daerahnya yang diberikan pemerintah pusat.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan yang harus dilakukan bagi penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini antara lain: (1) Penelitian ini hanya menguji 4 variabel independen saja yaitu variabel Efisiensi, Efektivitas, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Desentralisasi Fiskal dan besar pengaruhnya tidak mencapai 100% karena ada 2 (dua) variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Padahal masih ada variabel-variabel independen lain diluar variabel yang diteliti pada penelitian ini yang dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur, (2) Terbatasnya objek penelitian yang digunakan hanya pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur, sehingga hasil penelitian hanya dapat digeneralisasi di wilayah Provinsi Jawa Timur, (3) Terdapat beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang tidak mempublikasikan laporan keuangan ke publik dan mengakibatkan keterbatasan data pada penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran atas hasil penelitian sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali Potensi-Potensi local daerahnya melalui variable-variabel yang ada di penelitian ini, karena telah terbukti bahwa dengan meningkatnya keuangan daerah. Maka akan memberikan motivasi kepada daerah-daerah lain lain untuk berpacu meningkatkan belanja modal di daerahnya sehingga menghasilkan kinerja yang lebih optimal, (2) Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat menambah variable-variabel bebas (independen) lainnya yang dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan tidak meneliti Kabupaten/kota di Provinsi Jawa timur saja, dapat meneliti atau menambah kabupaten/Kota di wilayah lain yang ada di Indonesia, dalam meneliti Kinerja Keuangan daerah diharapkan dapat menggunakan rasio selain Efisiensi, Efektivitas, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Desentralisasi Fiskal dan lainnya dan mengkajinya lebih dalam lagi, (3) Bagi Masyarakat ataupun wajib pajak lainnya diharapkan untuk memiliki kesadaran diri yang lebih tinggi dalam membayar pajak secara tepat waktu dengan tidak melampaui batas pembayaran sehingga daerah dapat memperoleh dana yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah guna mengurangi ketergantungan daerah dan membiayai pembangunan daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhini dan S. Handayani. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal untuk Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Assyurriani, R. 2016. Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Di Kepulauan Riau Tahun 2010 - 2013. *Jurnal Akuntansi*.
- Aulianisa, F. 2013. Pengaruh Faktor Fundamental Dan Risikosistematik Terhadap Harga Saham Di Pasar Modal Syariah (Studi Empiris JII di BEI Tahun 2007-2010). *Jurnal Ekonomi Islam* 7(1): 85-103.
- Darwanto dan Y. Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*. 26-28 Juli.

- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2008. *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN. Yogyakarta.
- Iskandar, A. dan A. Subekan. 2014. Local Financial Performance and The Social Welfare on Districts Sulawesi on 2008-2012: Panel Regression with Random Effect. *Jurnal Info Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)* 1(12): 79-101.
- Jaya, I.P.N.P.K. dan A.A.N.B. Dwirandra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7(1): 79-92.
- Kasiram, M. 2008. *Metodologi Penelitian*. UIN-Malang Pers. Malang.
- Kusumawati, V.E. 2010. Faktor-Faktor yang menentukan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal di Indonesia (Survei pada Pemerintahan Daerah di Indonesia Bagian Barat dan Tengah). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2006. *Reformasi keuangan negara dan daerah di era otonomi*. *Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, Standar akuntansi pemerintahan telaah kritis PP Nomor 24 Tahun 2005*. 23-39. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Nguyen, L.P. dan S. Anwar. 2011. Fiscal Decentralization and Economic Growth in Vietnam. *Journal of Asia Pacific Economy* 16(1): 3-14.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pradiatmi, I.N. dan H. Wibowo. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* 5(2): 759-767.
- Purwanto, E.A. dan D.R. Sulistyastuti. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan masalah-masalah Sosial*. Gava Media. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 08/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.
- _____. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266/ PMK.07/2016 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Riyanto, B. 2001. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. BPFE. Yogyakarta.
- Seftianne dan R. Handayani. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Publik Sektor Manufaktur. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 13 (1): 39-56.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sularso, H. dan Y.E. Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi* 1(2): 109-124.
- Sulistyowati, D. dan D. Muid. 2011. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DanaAlokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Tamawiwiy, J., J.J. Sondakh, dan J.D.L. Warongan. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik (Studi pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Sulawesi Utara* 103-124.
- Tuasikal, A. 2008. Pengaruh DAU, DAK, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* 1(2): 142-154.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Vegasari, I.K. 2010. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Pemda Seluruh Indonesia. *Jurnal Akuntansi* 6(6): 1-15.

- Verawaty, C.I.M. 2016. Analisis Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Imliah MbiA* 16(1): 1-10.
- Yovita, F.M. and D.C. Utomo. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008-2010). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.